

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
ORGANISASI NIRLABA**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. DR. Ir. Suhardi, M.Si
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Ketua Umum
2. Nama : Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, MA
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Bendahara Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Partai Gerindra.
2. Laporan keuangan Partai Gerindra telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Partai Gerindra dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Partai Gerindra tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Partai Gerindra.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
Bendahara Umum



Jakarta, 23 Mei 2013



Prof. DR. Ir. Suhardi, M.Si
Ketua Umum

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. HSR-DS/BO/26.GERINDRA-LAI/13

Kepada Yth,
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
(Organisasi Nirlaba)

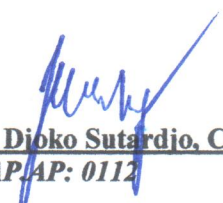
Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) - Organisasi Nirlaba pada 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan perubahan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Laporan keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum merupakan laporan konsolidasian Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 676 Tahun 2003 tentang tata administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik, serta pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum didalam Bab I - Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) dan (7) menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan partai politik adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pimpinan partai politik di tingkat pusat dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan tahunan pengurus partai politik tingkat Propinsi yang mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan partai politik pada jajarannya di daerah sampai dengan tingkatan yang paling rendah.

Menurut pendapat kami, kecuali atas laporan keuangan tersebut diatas yang belum mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada jajarannya di daerah sampai dengan tingkatan yang paling rendah, sebagaimana diungkapkan di dalam paragraf tersebut diatas, laporan keuangan yang kami sebut diatas, menyajikan secara wajar, posisi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan perubahan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Jakarta, 23 Mei 2013


Drs. Djoko Sutardjo, CPA
NRAP/AP: 0112

Head Office :

Menara FIF, 12th Floor, Suite 121
Jl. TB. Simatupang Kav. 15 Cilandak
Jakarta Selatan 12440 - Indonesia
Phone : +62-21 29045217 (Hunting),
+62-21 29045219, 29045237
Fax : +62 21 29045238
Email : info@hsrfirm.co.id
Website : www.hsrfirm.co.id

Branch Office :

Graha Mandiri 19 th Floor
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : +62-21 39838734,
+62 -21 39838735
Fax : +62-21 39832081
E-mail : branch@hsrfirm.co.id

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<u>ASET</u>	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ASET			
Kas dan bank	2b, 3	1.173.849.753	1.034.223.157
Aset Terikat Untuk Investasi :	2c, 4		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 518.800.271 tahun 2012 dan Rp.200.094.188 tahun 2011		2.504.565.729	91.187.812
JUMLAH ASET		<u>3.678.415.482</u>	<u>1.125.410.969</u>
<u>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</u>			
LIABILITAS			
Hutang kepada Pengurus		500.000	500.000
Biaya yang masih harus dibayar		50.000.000	25.000.000
Hutang pajak	5	200.000.000	100.000.000
Jumlah Liabilitas		<u>250.500.000</u>	<u>125.500.000</u>
ASET NETO	2d		
Tidak Terikat		3.427.915.482	999.910.969
Terikat Temporer		-	-
Jumlah Aset Neto		<u>3.427.915.482</u>	<u>999.910.969</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>3.678.415.482</u>	<u>1.125.410.969</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

LAPORAN AKTIVITAS

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	2012		2011	
		Tidak Terikat	Terikat Temporer	Tidak Terikat	Terikat Temporer
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT					
Penerimaan					
Kas Negara melalui APBN	2e, 6	501.421.860	-	501.421.860	-
Iuran anggota Fraksi Gerindra DPR RI	2e, 7	2.083.000.000	-	2.184.000.000	-
Sumbangan pihak ketiga	2e, 8	5.225.000.000	-	2.274.800.000	-
Sumbangan perorangan	2e, 9	201.009.000	-	-	-
Lain-lain	2e, 10	10.663.325	-	12.863.391	-
Jumlah Penerimaan		8.021.094.185	-	4.973.085.251	-
Pengeluaran					
Beban penerimaan kas melalui APBN	2e, 11	501.500.000	-	502.150.258	-
Beban kegiatan DPP	2e, 12	-	-	169.634.037	-
Beban program bidang	2e, 13	141.534.910	-	48.471.500	-
Beban kegiatan sayap Partai	2e, 14	1.700.000.000	-	70.840.000	-
Beban bakti sosial	2e, 15	3.895.000	-	10.200.000	-
Beban publikasi dan kehumasan	2e, 16	294.977.500	-	1.464.004.500	-
Beban umum dan administrasi	2e, 17	2.949.718.262	-	2.726.008.158	-
Beban lain-lain	2e, 18	1.464.000	-	1.559.000	-
Jumlah Pengeluaran		5.593.089.672	-	4.992.867.453	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		2.428.004.513	-	(19.782.202)	-
ASET NETO AWAL TAHUN		999.910.969	-	1.019.693.171	-
ASET NETO AKHIR TAHUN		3.427.915.482	-	999.910.969	-

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

LAPORAN ARUS KAS

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan (Pengeluaran) Kas Dari :			
Kas Negara melalui APBN	2e, 6	501.421.860	501.421.860
Iuran anggota DPR RI	2e, 7	2.083.000.000	2.184.000.000
Sumbangan pihak ketiga	2e, 8	4.325.000.000	1.374.800.000
Sumbangan perorangan	2e, 9	201.009.000	-
Penerimaan lain-lain	2e, 10	10.663.325	12.863.391
Jumlah		<u>7.121.094.185</u>	<u>4.073.085.251</u>
Pengeluaran kas untuk :			
Beban kegiatan Partai		(4.247.919.589)	(3.966.308.453)
Beban lain-lain		(1.464.000)	(1.559.000)
Jumlah		<u>(4.249.383.589)</u>	<u>(3.967.867.453)</u>
Kas Neto Yang Diterima Untuk Aktivitas Operasi		<u>2.871.710.596</u>	<u>105.217.798</u>
AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	2e, 4	(2.732.084.000)	(27.582.000)
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>(2.732.084.000)</u>	<u>(27.582.000)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN			
Pinjaman dari Pengurus		-	500.000
Kas Neto Yang Diterima dari Aktivitas Pendanaan		<u>-</u>	<u>500.000</u>
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		139.626.596	78.135.798
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		<u>1.034.223.157</u>	<u>956.087.359</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		<u>1.173.849.753</u>	<u>1.034.223.157</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILRABA)**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Partai Gerakan Indonesia Raya selanjutnya disebut (Gerindra) merupakan organisasi nirlaba didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Pebruari 2008 dari Liena Latief,SH Notaris di Jakarta. Akta ini telah mengalami perubahan dengan No. 37 tanggal 16 Mei 2012 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

1. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di Tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
2. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.
3. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
4. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat DPP, DPD dan DPC atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
5. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
6. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
7. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
8. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam Pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
9. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
10. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
11. Menyelesaikan perselisian kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
12. Memberi penghargaan sesuai ketentuan AD/ART atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
13. Memberikan sanksi sesuai ketentuan AD/ART, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
14. Menyelenggarakan Kongres.
15. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
16. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina
17. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
18. Menyelenggarakan konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
19. Membentuk Badan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
20. Mejalin hubungan dan kerjasama denga Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
21. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
22. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NILLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

23. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
24. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
25. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat DPP, DPD dan DPC.
26. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebesar 33 (Tiga puluh tiga) Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebesar 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) Cabang.

Tujuan pembentukan organisasi adalah :

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan.
 5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Untuk menunjang pelaksanaan aktivitasnya Partai Gerakan Indonesia Raya didukung dengan dana yang diperoleh dalam bentuk :

1. Iuran anggota dan iuran Pengurus Partai
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat
3. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
4. Sumbangan penghasilan dari anggota DPR dan DPRD

Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 16 Mei 2012 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH,MH Notaris di Jakarta, susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	: Prof DR Ir Suhardi, Msi
Wakil Ketua Umum :	
Bidang Politik,Hukum dan Keamanan	: Fadli Zon.SS,Msi
Bidang Politik Dalam Negeri	: Ir.Basuki Tjahaja Purnama
Bidang Pemerintah Umum	: Hj.Mestariy Habie,SH
Bidang Pembinaan Aparatur Pemerintah	: Seno Broto
Bidang Otonomi Daerah	: Hairudin,SH
Bidang Pembinaan Pembangunan Daerah	: Kolonel (Purn) Sahala Silalahi
Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan	: Udi Sumandoro,SE
Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	: Drs.M.Solihat
Bidang Hubungan Internasional	: Irawan Ronodipuro

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional	: Irmawaty Habie,SH
Bidang Pertahanan	: Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenaryo
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	: Johan J.Lewerissa,SH
Bidang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional	: Feryzal Adam,SE,MM
Bidang Kesejahteraan Rakyat	: DR Sumarjati Arjoso
Bidang Sosial	: Yetti Wulandari,SH
Bidang Pengabdian Masyarakat	: A.S.Kobalen,SE,MBA
Bidang Advokasi Perempuan	: Hj.Merry Assegaf,SE,MS
Bidang Anak	: Dr.Karlina Soepriyatno
Bidang Keluarga Berencana	: Dr.Batara Sirait,Sp.Og
Bidang Kesehatan	: Dr.Benyamin Paulus Oktavianus,Sp.P
Bidang Agama	: Habib Mahdi Alatas
Bidang Pendidikan Nasional	: Prof.DR Susilo Wibowo,MS.Med,SP.And
Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya	: Anak Agung Ayu Jelantik
Bidang Kesenian dan Perfilman	: Jamal Mirdad
Bidang Olahraga	: Kharisma Febriansyah
Bidang Penanggulangan Bencana	: Achmad Riza Patria
Bidang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Terlarang	: Andi Seto Gadysta Asapa
Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional	: Edhy Prabowo,MM,MBA
Bidang Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Nasional	: DR.Suyatno,SE,MM.Ak
Bidang Pariwisata	: Drg. Putih sari
Bidang Ekonomi Kreatif	: Jasmin B Setiawan
Bidang Lingkungan Hidup	: Dhohir Farisi
Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	: Ikhsan Abdullah,SH,MM
Bidang Keuangan	: Fary Djemy Francis
Bidang Investasi dan pasar Modal	: Budi Satrio Djiwandono
Bidang Perbankan	: Agung Gumilar Saputra,MM,MBA
Bidang Penerimaan Negara	: Arnes Lukman Nasution
Bidang Pajak	: Zacharias Omawele
Bidang Pekerjaan Umum	: Danang Wicaksana Sulistya,ST
Bidang Percepatan Pembangunan Daerah	: Idin Rosidin
Bidang Perumahan Rakyat	: Amir Gaos Latuconsina
Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	: Rindoko Dahono
Bidang Riset dan Teknologi	: Heirma S.Poernomo
Bidang Teknologi Terapan	: Abdul Hakam
Bidang Tenaga Kerja Terampil	: FX.Arief Poyuono,SE
Bidang Ekonomi	: Murphy Hutagalung,MBA
Bidang Koperasi dan usaha Mikro,Kecil dan Menengah	: Syihabuddin AR,SE
Bidang Pertambangan	: Dian Nugroho,ST
Bidang Pemberdayaan dan Konservasi Energi	: Dirgo D.Purbo
Bidang Perindustrian	: Budi Tjahjono Prawiro
Bidang Perdagangan	: Hery Ardianto

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Bidang Hukum dan Perdagangan	: Maralda Hernanda Kairupan,SH,LLM,MCIArb
Bidang Pertanian	: Eko Wibowo,SIP
Bidang Perternakan	: Drh Muchlido Apriliast
Bidang Kehutanan	: Ir.H.Satmodjo Sastrowidjojo,CES
Bidang Transmigrasi	: Eddy DJ.Wibowo,SH
Bidang Perhubungan	: Dipl. Ing. Suryanto Sosrojoyo
Bidang Perikanan dan Kelautan	: Ir.Suminta Ismail
Bidang Badan Usaha Milik Negara	: DR.Ir.Hasan Saman
Bidang Organisasi,Kaderisasi dan keanggotaan	: Widjono Harjanto,SH
Bidang Organisasi dan Keanggotaan	: Ir.Sufmi Dasko Ahmad,SH,MH
Bidang Kaderisasi	: Desmon Mahesa Djunaedi
Bidang Informasi Strategis	: Sugiono,MM,MBA
Bidang Pemetaan Potensi Basis Pemilih	: Agus Priyono
Bidang Komunikasi dan Informasi	: Ondy Saputra
Bidang Hubungan Masyarakat	: Drs.Manimbang Kahariady
Bidang Pendidikan dan Pelatihan	: Prasetyo Hadi,SK
Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai	: Pius Lustrilanang
Bidang Hubungan dan Kerjasama Lintas Lembaga	: Widiyanto Saputra,SE
Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Partai	: Ibnu Ariebowo
Bidang Advokasi	: Habiburrohman,SH
Bidang Upacara dan Tradisi Partai	: Chusni Mubarak
Bidang Logistik Organisasi	: Adnani Taufiq,SS
Bidang Pembinaan Mental dan Idiologi	: M. Zastrouw
Sekretaris Jenderal	: H. Ahmad Muzani,SS
Wakil Sekretaris Jenderal	: Brigadir Jenderal TNI (Purn) Anwar Ende,SIP
Bendahara Umum	: Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 6 Pebruari 2008 dari Liena Latief, SH Notaris di Jakarta, susunan pengurus Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	: Prof DR Ir Suhardi, Msi
Wakil Ketua Umum	: Fadli Zon.SS,Msi
Sekretaris Jenderal	: H. Ahmad Muzani
Bendahara Umum	: Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono,MA

Visi :

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Misi :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atas latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.

Fungsi dan Tugas

Fungsi :

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun dan merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan disegala bidang.
8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas :

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi aspek-aspek, ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
6. Mempersiapkan kader-kader Partai terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelenggaraan kekuasaan politik.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah ini :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Partai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Laporan keuangan Partai Gerindra hanya meliputi laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan merupakan laporan konsolidasi Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan bank

Kas dan bank mencakup kas dan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

c. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Tahun</u>	<u>%</u>
Peralatan kantor	4	25
Perlengkapan kantor	4	25

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan aktifitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktifitas .

d. Aset Neto

Aset bersih digolongkan menjadi aset neto tidak terikat, terikat temporer, atau terikat permanen, tergantung ada tidaknya pembatasan. Partai menyajikan hibah atau wakaf berupa kas dan aset lainnya sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah berlalu, yaitu pada saat pembatasan masa telah berakhir atau pembatasan tujuan telah terpenuhi, aset neto terikat temporer digolongkan menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Aset neto yang berasal dari dana APBN jika merupakan sisa kas dana anggaran yang akan dikembalikan ke Kas Negara, tetapi jika berupa aset tetap akan dipindahkan ke Partai.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

e. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi organisasi Nirlaba dan yang sejenisnya, dinyatakan bahwa bantuan atau sumbangan bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungannya antara pemberi dan penerima sumbangan. Oleh karena itu Partai tidak menghitung dan mengakui pajak kini.

f. Aset Neto

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu :

- Pembatasan Permanen

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

- Pembatasan Temporer

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhi keadaan tertentu.

- Sumbangan Terikat

Adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.

- Sumbangan Tidak Terikat

Adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

3. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kas	370.510.606	177.192.770
Bank :		
Bank Rakyat Indonesia	654.037.109	647.441.594
Bank Mandiri	82.515.646	143.794.919
Bank Central Asia	66.786.392	65.793.874
Jumlah	<u>1.173.849.753</u>	<u>1.034.223.157</u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. HUTANG PAJAK

Akun ini merupakan hutang pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung dengan saldo per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 dan Rp. 100.000.000.

6. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal tanggal 25 April 2012 dan 7 Desember 2011 Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2012 dan 2011 kepada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar Rp. 501.421.860 (Lima ratus satu juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Bantuan yang diterima berdasarkan jumlah suara yang diterima sebanyak 4.642.795 (Empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) suara pada Pemilu tahun 2009 dengan nilai satu suara sebesar Rp. 108.

Dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah, digunakan untuk :

1. Pendidikan Politik

Untuk menunjang peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan partisipasi politik untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila akan dilakukan dalam kegiatan :

- a. Pelatihan Kader partai Gerakan Indonesia Raya
- b. Seminar dan diskusi rutin

2. Operasional Sekretariat

Untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik yang sesuai dengan Pasal 24 Bab VII dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 :

- a. Adiministrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan data dan arsip
- d. Pemeliharaan peralatan kantor

7. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 2.083.000.000 (Dua milyar delapan puluh tiga juta rupiah) dan Rp. 2.184.000.000 (Dua milyar seratus delapan puluh empat juta rupiah).

Sumbangan diterima partai dari 26 orang anggota Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana satu anggota menyumbang sebesar Rp. 7.000.000 per bulan (*lihat Lampiran 1*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 disebutkan bahwa sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) per orang dalam 1 (satu) tahun anggaran dan perusahaan atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan sumbangan dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PT Nusantara Energy	2.725.000.000	-
PT Comexindo Internasional	1.500.000.000	2.254.800.000
PT Arsari Pratama	1.000.000.000	-
Lain-lain	-	20.000.000
Jumlah	<u><u>5.225.000.000</u></u>	<u><u>2.274.800.000</u></u>

PT Nusantara Energy

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari PT Nusantara Energy dan dana ini digunakan untuk pembelian 35 unit kendaraan bermotor yang digunakan untuk ambulance (*Lihat Catatan No. 4*).

PT Comexindo Internasional

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari PT Comexindo Internasional, pada tahun 2012 dan 2011, dana ini digunakan untuk biaya operasional Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, penerbitan majalah Tani Merdeka dan tabloid Indonesia Raya dan biaya sewa gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional Partai.

PT Arsari Pratama

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari PT Arsari Pratama dan dana ini digunakan untuk pembayaran sewa gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional Partai.

9. SUMBANGAN PERORANGAN

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari perorangan yang digunakan untuk biaya operasional Partai, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2012</u>
T.A Muliatna Djiwandono M.A.	200.000.000
Bpk Dasko	400.000
Lain-lain	609.000
Jumlah	<u><u>201.009.000</u></u>

10. PENERIMAAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan penerimaan jasa giro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 10.663.325 dan Rp. 12.863.391,-.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN PENERIMAAN KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pelatihan Kaderisasi Partai Gerindra	250.000.000	347.708.335
Listrik dan telepon	102.171.077	61.358.749
Simposium Partai Gerindra	71.787.500	-
Kegiatan Lokakarya	20.496.090	-
Alat tulis kantor	19.872.000	5.983.200
Beban pemeliharaan data dan arsip	15.448.333	2.296.998
Beban rumah tangga	7.252.000	4.180.000
Beban rapat internal Pengurus	7.095.000	34.027.513
Beban transportasi dan perjalanan dinas	6.930.000	-
Jasa pos dan giro	448.000	427.000
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)	-	46.168.463
Jumlah	<u><u>501.500.000</u></u>	<u><u>502.150.258</u></u>

Pelatihan Kaderisasi Partai Gerindra

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan pendidikan politik bagi kader Tunas Indonesia Raya (Tidar), untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 250.000.000 dan Rp. 347.708.335.

Simposium Partai Gerindra

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Simposium Partai Gerindra yang dilaksanakan di Jakarta. Acara ini membahas tentang sikap Pemerintah dalam kebijakan dibidang Energi.

12. BEBAN KEGIATAN DPP

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai pada tanggal 13 - 15 Januari 2011 di Hotel Redtop Pecenonagn Jakarta Pusat sebesar Rp. 169.634.037 untuk tahun 2011.

13. BEBAN PROGRAM BIDANG

Akun ini terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Biaya operasional bidang kesehatan	90.500.000	7.532.000
Kegiatan Lokakarya	51.034.910	40.939.500
Jumlah	<u><u>141.534.910</u></u>	<u><u>48.471.500</u></u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN KEGIATAN SAYAP PARTAI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kampanye Pilkada DKI Jakarta	1.500.000.000	-
Verifikasi KPU	200.000.000	-
Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA)	-	70.840.000
Jumlah	<u>1.700.000.000</u>	<u>70.840.000</u>

Kampanye Pilkada DKI Jakarta

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan dana ini berasal dari sumbangan PT Comexindo Internasional (*Lihat Catatan No. 7*).

Verifikasi KPU

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk Tim Verifikasi di 16 (Enam belas) Propinsi atas pemenuhan syarat pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu 2014 oleh Dewan DPD dan DPC diseluruh Indonesia.

Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA)

Akun ini merupakan biaya operasional bidang kesehatan yang digunakan untuk kegiatan bantuan kesehatan pada masyarakat Indonesia.

15. BEBAN BAKTI SOSIAL

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kegiatan masyarakat, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 3.895.000 dan Rp. 10.200.000.

16. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Cetak majalah dan tabloid	180.000.000	1.254.800.000
Milad Partai Gerindra	100.000.000	-
Langganan majalah dan koran	5.060.000	6.159.000
Konferensi pers	5.000.000	15.000.000
Atribut partai	4.917.500	121.045.500
Domain website	-	35.500.000
Publikasi dan media	-	31.500.000
Jumlah	<u>294.977.500</u>	<u>1.464.004.500</u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Beban sewa gedung	1.000.000.000	1.000.000.000
Beban operasional Pengurus	718.166.700	811.784.350
Gaji dan tunjangan	431.958.400	452.700.000
Beban penyusutan aset tetap	318.706.083	68.244.188
Beban jamuan	71.526.633	43.598.300
Jasa tenaga ahli	60.000.000	-
Beban pemeliharaan	52.478.909	51.503.012
Beban konsumsi	43.830.000	36.625.000
Listrik, telepon dan internet	33.238.805	46.108.904
Beban transportasi dan perjalanan dinas	27.502.066	17.998.000
Beban jasa profesional	25.000.000	25.000.000
Beban rapat internal Pengurus	23.262.500	20.396.074
Beban rumah tangga	19.414.934	14.860.460
Beban pajak	15.367.666	15.747.700
Beban inventaris dan instalasi kantor	13.499.500	10.723.000
Alat tulis kantor	12.252.600	12.989.870
Beban asuransi kendaraan	9.642.750	-
Beban jasa keamanan dan kebersihan	3.300.000	75.929.000
Lain-lain	70.570.716	21.800.300
Jumlah	<u><u>2.949.718.262</u></u>	<u><u>2.726.008.158</u></u>

Sewa Gedung

Akun ini merupakan biaya sewa gedung yang beralamat di Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, gedung digunakan untuk kegiatan operasional Partai dengan saldo per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.

18. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya administrasi bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 1.464.000 dan Rp. 1.559.000.

19. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 23 Mei 2013.